

INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS

“Community Empowerment in the Context of Political Education to Improve the Economy in Border Region”

“Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pendidikan Politik Guna Meningkatkan Perekonomian di Wilayah Perbatasan”

**Gedung Engku Kelana Tembilahan, Riau - Indonesia
2-4 Desember 2015**

EDITOR/ PENYUNTING:

Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H., M.H., M.M., Ph.D.

Dr. H. Abdullah, S.Si., M.KOM., Ph.D.

Dr. H. Najamuddin, Lc., M.A.

Gulam Muhammad, S.E., M.M.

Wandi, S.H., M.H.

Junaidi, S.H.I., M.Hum.

Nursida, S.P., M.P.

Tiar Ramon, S.H., M.H.

Titin Triana, S.H., M.H.

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI (UNISI)
TEMBILAHAN**

INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS

“Community Empowerment in the Context of Political Education to Improve the Economy in Border Region”

“Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pendidikan Politik Guna Meningkatkan Perekonomian di Wilayah Perbatasan”

all rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

@2015 LPPM Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan

EDITOR/ PENYUNTING:

Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H., M.H., M.M., Ph.D.

Dr. H. Abdullah, S.Si., M.KOM., Ph.D.

Dr. H. Najamuddin, Lc., M.A.

Gulam Muhammad, S.E., M.M.

Wandi, S.H., M.H.

Junaidi, S.H.I., M.Hum.

Nursida, S.P., M.P.

Tiar Ramon, S.H., M.H.

Titin Triana, S.H., M.H.

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan

Jl. Provinsi Indragiri Hilir, Riau, Indonesia

Email: lppm@unisi.ac.id

Webside: www.lppm.unisi.ac.id

Contak Person: 0821 7000 6640

viii + 310 ; 17 x 24 cm

Cetakan I, 2015

ISBN: 978-602-74432-1-1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Prosiding Seminar Internasional “*Community Empowerment in the Context of Political Education to Improve the Economy in Border Region*” (Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pendidikan Politik Guna Meningkatkan Perekonomian Wilayah Perbatasan). Prosiding ini merupakan dokumentasi karya ilmiah para peneliti dari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan sains, ekonomi sosial dan keagamaan dalam menyambut Masyarakat Ekonomi Asean dan telah dipresentasikan pada tanggal 2 - 4 Desember 2015.

Pertemuan dan presentasi ilmiah tersebut merupakan kegiatan lanjutan dari Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Indragiri Angkatan Ke VII Tahun 2015. Pembukaan Pertemuan dan Presentasi ilmiah dilakukan oleh Bupati Kabupaten Indragiri Hilir dan dilanjutkan pidato H. Marwan Jafar, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan judul “*Pengembangan Ekonomi Di Wilayah Perbatasan*”.

Semoga penerbitan prosiding ini dapat bermanfaat untuk lebih memacu dan mengembangkan penelitian yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah ikut membantu penerbitan prosiding ini kami ucapkan terimakasih.

Ketua

LPPM UNISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
 RUMUSAN SEMINAR INTERNASIONAL:	
“Community Empowerment in the Contest of Political Education to Improve the Economy in Border Region”	1 - 9
 KEYNOTE SPEAKER	
“PENGEMBANGAN EKONOMI DI WILAYAH PERBATASAN”	
H. Marwan Jafar	
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.....	11 - 17
 01 - MERAPATKAN JURANG DIGITAL UNTUK MEMPERKASA EKONOMI	
Prof. Dr. Ku Ruhana Ku Mahamud	19 - 26
(Universiti Utara Malaysia)	
 02 - BUDAYA JAWA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT WILAYAH PERBATASAN	
Prof. Dr. H. Sutejo K. Widodo, M.Si.	27 – 39
(Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang)	
 03 - MEMBANGUN PENDIDIKAN INDONESIA: PERMASALAH DAN SOLUSINYA	
Dr. Rafiuddin Afkari Hj.Abdul Fattah, M.A. & Siti Marfuah, M.A.	41 - 53
(Universiti Tun Hussein Onn Malaysia)	

04 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GUNA MENINGKATKAN KOMUNIKASI POLITIK DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL	
Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H., M.H., M.M., Ph.D.	55 – 79
(Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri)	
05 - ANALISIS PROSPEKTIF PERKEBUNAN RAKYAT DI WILAYAH PERBATASAN (Studi Kasus Perkebunan Kelapa Rakyat Kabupaten Indragiri Hilir)	
Dr. H. Abdullah, S.Si., M. Kom., Ph.D.	81 – 97
(Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Islam Indragiri)	
06 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN MELALUI LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH NON BANK ; Sebuah Upaya Membumikan Ekonomi Islam	
Dr. H. Najamuddin, Lc., M.A. & Hj. Mardianah	99 – 109
(Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri)	
07 - PEMBERDAYAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN PEMBANGUNAN	
Dr. Edwar, S.H., M.H., Darmiwati, S.H., M.H. dan Triyana Syafitri, S.H., M.H.	111 - 122
(Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri)	
08 - PERANAN PENDIDIKAN SEJARAH DALAM MENUMBUHKAN RASA NASIONALISME DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL	
Edi Susrianto Indra Putra	123 – 132
(Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Indragiri)	
09 - PENINGKATAN KESEJAHTRAAN SOSIAL UMAT MENURUT AL-QURAN	
Amaruddin, S.Ag., M.A.	133 – 149
(Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri)	
10 - ANTARA INDONESIA DENGAN TIMOR LESTE	
Syariffuddin KMS & Novyar Satriawan	151 – 162
(Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri)	

- 11 - IMPLEMENTASI ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS PENILAIAN DESA
DALAM PROGRAM DMIJ UPAYA PENINGKATAN KETAHANAN EKONOMI
MASYARAKAT PERBATASAN**
Ilyas, S. Kom., M. Kom. 163 – 173
(Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Islam Indragiri)
- 12 - OPTIMALISASI PEMANFAATAN AMPAS KELAPA MENJADI PRODUK
PANGAN FUNGSIONAL DI DALAM MENDUKUNG PENERAPAN TEKNOLOGI
TEPAT GUNA DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
Retti Ninsix 175 - 187
(Fakultas Pertanian Universitas Islam Indragiri)
- 13 - SINKRONISASI KEWENANGAN PENYIDIK POLISI NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP
TINDAK PIDANA PELAYARAN DI LAUT TERITORIAL INDONESIA**
Inggit Fernandes, S.H., M.H. & Fitri Wahyuni, S.H., M.H. 189 – 202
(Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri)
- 14 - PENAMBANGAN PASIR LAUT DI PROVINSI RIAU DITINJAU DARI
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**
Dwi Sushanty 203 – 218
(Fakultas Pertanian Universitas Islam Indragiri)
- 15 - PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA ALAM PERSPEKTIF ALQURAN**
Dewi Murni Manurung 219 – 230
(Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri)
- 16 - PERANAN WEBSITE E-COMMERCE GUNA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DI WILAYAH PERBATASAN ; Studi kasus pada UMKM
di Kab. INHIL**
Dwi Yuli Prasetyo, S.Kom., M. Kom. 231 - 239
(Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Islam Indragiri)

17 - PAKAN ALAMI ALTERNATIF SEBAGAI SOLUSI DALAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN BETUTU (<i>Oxyleotris marmorata</i>. Blkr.) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	
Syaiful Ramadhan Harahap	241 - 253
(Fakultas Pertanian Universitas Islam Indragiri)	
18 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA MELALUI UED-SP DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	
Siti Aisyah	255 - 262
(Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri)	
19 - PREFERENSI TETRASTICHUS BRONTISPAE FERRIERE (HYMENOPTERA: EULOPHIDAE) TERHADAP BRONTISPA LONGISSIMA GESTRO DAN PENGARUH KERAPATAN PARASITOID DI TANAMAN KELAPA	
Zahlul Ikhsa , Hidrayani dan Yaherwandi	263 - 275
(Fakultas Pertanian Universitas Islam Indragiri dan Universitas Andalas Padang)	
20 - UPAYA PENINGKATAN PENDIDIKAN DI WILAYAH PERBATASAN MELALUI PERGURUAN TINGGI; Studi Kasus Peluang dan Tantanga	
Maimunah, S.Ag., M.Pd.I.	277 - 284
(Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri)	
21 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANI MELALUI PENGUATAN MODAL PADA KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	
Yeni Afiza	285 - 293
(Fakultas Pertanian Universitas Islam Indragiri)	
22 - OPTIMALISASI POLITIK PENDIDIKAN NASIONAL MELALUI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH	
Irjus Indrawan, S.Pd.I., M.Pd.I.	295 - 303
(Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri)	
BIODATA EDITOR/ PENYUNTING	305 - 310



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GUNA MENINGKATKAN KOMUNIKASI POLITIK DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL

Oleh:

Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H., M.H., M.M., Ph.D.

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Abstraksi

Pemberdayaan partisipasi masyarakat sipil atau '*civil society*' merupakan alat ampuh dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan guna meningkatkan komunikasi politik dalam rangka pembangunan nasional pada masa-masa mendatang, keterlibatan ini akan memberikan dampak yang positif terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil atau yang akan di implementasikan, karena dapat membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Studi ini mengusulkan sebuah model pemberdayaan masyarakat yang mampu meningkatkan komunikasi politik yang akan berpengaruh terhadap pembangunan Nasional.

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode kualitatif, yaitu metode yang menekankan pada pengumpulan data dengan analisis teks tertulis (studi kepustakaan) dari data sekunder dan ditambah dengan data primer (pernyataan, wawancara, cerita, pengakuan). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan makalah ini menggunakan perspektif ketahanan nasional dengan analisis multi disiplin ilmu (*interdisipliner*).

Metode pendekatan dan tolok ukur pemberdayaan masyarakat adalah Metode kerja *doing for*, yang dipandang akan menjadikan masyarakat menjadi pasif, kurang kreatif dan tidak berdaya, bahkan mendidik masyarakat untuk bergantung pada bantuan pemerintah atau organisasi-organisasi sukarela pemberi bantuan. Sebaliknya, metode kerja *doing with*, merangsang masyarakat menjadi aktif dan dinamis serta mampu mengidentifikasi mana kebutuhan yang sifatnya *real-needs*, *felt needs* dan *expected need*. Konsep ini diharapkan mampu menjadi jembatan meningkatnya komunikasi politik dalam pembangunan nasional antara masyarakat dengan pemerintah dalam setiap agenda pembangunan baik dalam skala nasional maupun lokal.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Masyarakat, Komunikasi Politik dan Pembangunan Nasional*

1. LATAR BELAKANG

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional merupakan salah satu syarat mutlak dalam era kebebasan dan keterbukaan saat ini. Pengabaian terhadap faktor ini, terbukti telah menyebabkan terjadinya deviasi yang cukup signifikan terhadap tujuan pembangunan itu sendiri, yaitu keseluruhan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemborosan keuangan negara merupakan implikasi lain deviasi tersebut. Proses pelibatan partisipasi masyarakat lokal dalam implementasi proyek-proyek pembangunan di tingkat kabupaten/kota, terbukti telah berhasil membawa perubahan-perubahan mendasar dalam peningkatan kesejahteraan keluarga-keluarga pedesaan.¹

Bahkan dewasa ini, proses partisipasi publik merupakan tolok ukur bagi pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan. Bahkan, isu partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik tersebut juga telah menjadi isu global. Hal tersebut ditandai dengan munculnya isu *Good Governance* dalam mengelola kebijakan sebuah negara. M.M Billah menyatakan *good governance* dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu di dalam tindakan dan kehidupan keseharian.

Permasalahan yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat tidak bisa dituduhkan hanya pada bagaimana pelibatan partisipasi masyarakat semata, hal yang terpenting adalah *pertama*, pemerintah mampu menyusun dan merencanakan seperti apa konsep pengembangan dan model pemberdayaan masyarakat yang mampu meningkatkan komunikasi politik yang akan berpengaruh terhadap pembangunan nasional, *kedua*, pemerintah mampu merencanakan dan menganalisis seperti apa dan mengapa lingkungan strategis yang di hadapi berpengaruh terhadap upaya pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, *ketiga*, seperti apa seyogyanya konsep pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan komunikasi politik dalam rangka pembangunan nasional. Sehingga melalui konsep pemberdayaan tersebut pemerintah membangun strategi untuk mulai meningkatkan partisipasi masyarakat baik itu dalam proses maupun pelaksanaan pembangunan, kebijakan pembangunan ini menganut dua filosofi dasar yaitu *public touch and bringing the public in*, yakni sebuah kebijakan yang sungguh-sungguh menyentuh kebutuhan publik

¹ Clark, John, 1995 "The State, Popular Participation, and the Voluntary Sector." World Development 23, No. 4. Lihat juga Friedmann, John, 1992, Empowerment—The Politics Alternative Development, Cambridge: Blackwell Publishers

dan juga mampu membawa masyarakat masuk kedalam ruang-ruang kebijakan atau yang dikenal dengan sebutan pembangunan partisipatif.

Pembangunan partisipatif merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan pembangunan. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan (*level of involvement*) masyarakat dalam kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunitas dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Maksud dan tujuan makalah ini untuk mengkaji bagaimana: (1) Konsep pengembangan dan model pemberdayaan masyarakat yang mampu meningkatkan komunikasi politik yang akan berpengaruh terhadap pembangunan Nasional, (2) Perencanaan dan menganalisis pengaruh lingkungan strategis terhadap upaya pelibatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Nasional, (3) Seyogyanya kebijakan konsep pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan komunikasi politik dalam rangka pembangunan Nasional.

a. Metode dan Pendekatan

Metode yang digunakan penulisan MAKALAH ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang menekankan pada pengumpulan dengan analisis teks tertulis (studi kepustakaan) dari data sekunder dan ditambah dengan data primer (pernyataan, wawancara, cerita, pengakuan). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan MAKALAH ini menggunakan perspektif ketahanan nasional dengan analisis multi disiplin ilmu (interdisipliner).

b. Pengertian-pengertian

Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas (*independent*) dan mandiri². Dari pengertian tersebut menurut hemat

² Sumaryo Gitosaputro, 1995, *Implementasi Participatory Rural Appraisal (PRA)*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Volume 2, Nomor 1, Juni 2006, Lihat juga pendapat R.Chambers dalam bukunya yang berjudul *Rural Development : Putting The Last First*. London ; New York: Longman.

penulis bahwa pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya adalah upaya yang secara terencana, sistematis dan berkelanjutan untuk memampukan, melibatkan, dan memberikan tanggung jawab yang jelas kepada masyarakat dalam pengelolaan pembangunan bagi kepentingan peningkatan kesejahteraannya. Sedangkan dari dimensi politik pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai akses masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan publik/masyarakat, artinya pemberdayaan masyarakat merupakan suatu strategi yang sangat penting bagi upaya pembangunan nasional, dimana dalam setiap pelaksanaan pembangunan nasional membutuhkan dukungan penuh dan konkrit dari semua pihak dalam upaya untuk memampukan, melibatkan dan memberikan rasa tanggung jawab yang jelas kepada masyarakat dalam setiap agenda pembangunan nasional.³

Komunikasi Politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga- lembaga politik.⁴ Komunikasi politik antara pemerintah dan rakyat sebagai interaksi antara dua pihak yang menerapkan etik, partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan nasional bertujuan untuk menjamin agar pemerintah selalu tanggap terhadap masyarakat atau perilaku demokratisnya.

Pembangunan Nasional adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi⁵. Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan keamanan dengan senantiasa harus mewujudkan wawasan nusantara serta memperkuat Ketahanan Nasional.

2. METODOLOGI PENELITIAN

³ Jhon Friedman, 1992, *Empowerment The Politics of Alternative Development*. Blackwell Publishers, Cambridge, USA.

⁴ Astrid S. Susanto, 1989, *Komunikasi Sosial di Indonesia*, Jakarta, Hal. 9. Lihat juga alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat dari pembangunan nasional.

⁵ Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia Ke 4.

LANDASAN PEMIKIRAN

Berubahnya paradigma pembangunan nasional ke arah demokratisasi dan desentralisasi, menumbuhkan kesadaran yang luas tentang perlunya peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses dan program pembangunan. Pemberdayaan dan partisipasi muncul sebagai dua kata yang banyak diungkapkan ketika berbicara tentang pembangunan. Meskipun demikian, pentingnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya dihayati dan dilaksanakan oleh *stakeholders* pembangunan, baik dari kalangan pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat. Bahkan di kalangan masyarakat sendiri masih gamang menghadapi praktek partisipasi dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan di lingkungannya. Di sisi lain, hampir semua proyek dan program pemerintah mensyaratkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya, dimana masyarakat ditempatkan pada posisi strategis yang menentukan keberhasilan program pembangunan. Akan tetapi, dalam prakteknya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sering disalahgunakan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.⁶ Beberapa landasan Pemikiran dalam Pembangunan Nasional.

a. Pancasila sebagai Landasan Idiil

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus dijadikan landasan dalam setiap peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika ditelaah sila per sila yang terdapat dalam Pancasila, upaya mengimplementasikan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan nasional terdapat dalam sila ke kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Undang Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia merupakan amanat konstitusi (UUD 1945), yang menegaskan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

⁶ Agus Purbathin Hadi, Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan Dalam Pembangunan, <http://www.google.suniscome.50webs.com/>. diakses tanggal 22 Mei 2012 Pukul 21.00 Wib.

c. Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional

Esensi wawasan nusantara tersebut digunakan sebagai pedoman oleh Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, upaya mengimplemantasikan pemberdayaan masyarakat terhadap kondisi nasional (pembangunan) yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat di perlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggal dan perbatasan.

d. Ketahanan Nasional Sebagai Landasan Konsepsional

Implementasi Konsepsi Tannas dalam Pembangunan Nasional, merupakan suatu tuntutan sejarah yang sangat diperlukan dalam menyatukan misi pencapaian Tujuan Nasional. Pada dasarnya implementasi Konsepsi Tannas identik dengan pandangan Geostrategi Indonesia dalam melaksanakan pembangunan Nasional, yang selama ini dilaksanakan Pemerintah Negara. Suatu pandangan dalam mengarahkan seluruh sumber daya nasional sebagai modal dasar dalam menggalikan situasi dan kondisi kehidupan nasional yang terintegrasi yang harus diwujudkan (Tannas), mengendalikan ruang hidup (Darat, Laut, dan Udara), serta mengendalikan waktu tahapan pembangunan (Jangka Panjang, Jangka Sedang dan Jangka Pendek).

LANDASAN TEORI

a. Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan secara partisipatif kiranya sangat sesuai dan dapat dipakai untuk mengantisipasi timbulnya perubahan-perubahan dalam masyarakat beserta lingkungan strategisnya. Sebagai konsep dasar pembangunan partisipatif adalah melakukan upaya pembangunan atas dasar pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat mampu untuk berkembang dan mengatasi permasalahannya sendiri secara mandiri, berkesinambungan dan berkelanjutan. Menurut Kumar⁷ bahwa keberdayaan adalah kondisi dinamik yang merefleksikan kemampuan suatu sistem sosial dalam mewujudkan tujuan atau nilai-nilai yang diacunya (diidamkannya)⁸.

⁷ Kumar S, 2002, *Methods for Commmunity Participation*, ITDP Publishing, London. Hal. 21.

⁸ *Ibid.*

b. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Nasional

Penggunaan istilah partisipasi terkait dua alternatif pilihan, *pertama*, partisipasi sebagai tujuan pada dirinya sendiri, *kedua*, sebagai alat untuk mengembangkan diri. Sebenarnya kedua interpretasi tersebut merupakan satu kesatuan, keduanya mewakili partisipasi yang bersifat transformasional dan instrumental dalam suatu program (proyek) tertentu, serta dapat kelihatan dalam kombinasi yang berbeda. Partisipasi instrumental terjadi ketika partisipasi dilihat sebagai suatu cara untuk mencapai sasaran tertentu, partisipasi masyarakat setempat dalam proyek-proyek yang dilakukan oleh orang luar. Partisipasi transformasional terjadi ketika partisipasi itu pada dirinya sendiri dipandang sebagai tujuan, dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi, misalnya masyarakat menjadi lebih berbudaya dan dapat berkelanjutan.⁹

Sebagai suatu tujuan, partisipasi akan menghasilkan pemberdayaan, yakni setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya. Dengan demikian partisipasi merupakan alat dalam memajukan ideologi atau tujuan-tujuan pembangunan yang normatif, seperti keadilan sosial, persamaan hak, dan demokrasi. Oleh karena itu sebagai alternatifnya, partisipasi ditafsirkan sebagai alat untuk mencapai efisiensi dalam manajemen proyek, atau sebagai alat dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan. Sebagai implikasinya, partisipasi menyangkut pula strategi manajemen, yang dapat digunakan oleh negara dalam mencoba untuk memobilisasi sumber daya-sumber daya yang dimilikinya.¹⁰

Selanjutnya dikatakan bahwa dilihat dari aspek perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, perencanaan sebagai upaya mekanis untuk mengubah keadaan masyarakat. Perencanaan dianggap sebagai *blue print* (cetak biru) perubahan tersebut yang dapat menciptakan pola-pola perubahan yang dirancang oleh perencana. Model ini sering dikenal sebagai *mechanistic planning model* atau *social engineering model*. Model perencanaan ini sering yang melahirkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) bagi pelaksana proyek pembangunan. Kadangkala juklak dan juknis tersebut tidak sesuai untuk wilayah tertentu. Dengan demikian masyarakat dianggap sebagai bagian pasif (subsistem) dari sistem pembangunan. *Kedua*, perencanaan sebagai usaha

⁹ Sumaryo Gitosaputro, *Op., Cit.*, Hal. 20.

¹⁰ *Ibid.*

mensistematisasi aspirasi pembangunan yang ada dalam masyarakat dan menyusunnya kedalam dokumen tertulis. Model ini melihat masyarakat sebagai sistem sosial yang penuh dengan nilai-nilai sosial budaya yang dinamis. Model ini sering disebut sebagai *human action planning model*.

Metode pendekatan dan tolak ukur pemberdayaan masyarakat, *Community Development* dengan segala kegiatannya dalam pembangunan sebaiknya menghindari metode kerja "*doing for the community*", tetapi mengadopsi metode kerja "*doing with the community*". Metode kerja *doing for*, akan menjadikan masyarakat menjadi pasif, kurang kreatif dan tidak berdaya, bahkan mendidik masyarakat untuk bergantung pada bantuan pemerintah atau organisasi-organisasi sukarela pemberi bantuan. Sebaliknya, metode kerja *doing with*, merangsang masyarakat menjadi aktif dan dinamis serta mampu mengidentifikasi mana kebutuhan yang sifatnya - *real needs, felt needs* dan *expected need* . Metode kerja *doing with*, sangat sesuai dengan gagasan besar KI Hajar Dewantara tentang kepemimpinan pendidikan di Indonesia - *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani* - yang berfokus akan perlunya kemandirian yang partisipatif di dalam proses pembangunan¹¹.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka berbagai metode yang digunakan dalam proses perencanaan partisipasi pembangunan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. *Participatory Rural Appraisal (PRA)*
2. Kaji Tindak Partisipatif (KTP)
3. *Participatory Research and Development (PRD)*
4. *Metode Rapid Rural Appraisal (RRA)*
5. *Metode Participatory Action Research (PAR)*
6. *Metode PPKP (Pemahaman Partisipatif Kondisi Pedesaan)*
7. *Metode Participatory Learning Methods (PLM)*
8. *Metodologi Participatory Assessment (MPA)*.

Proses pembangunan saat ini harus berakar dari bawah (*grassroots*),memelihara keberagaman budaya, serta menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagi manusia dan masyarakat. Dengan kata lain

¹¹ Tampobulon, M. 2006. *Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah*. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Medan. Sumatera Utara.

pembangunan harus menganut paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat. Dengan demikian, perlu adanya partisipasi secara aktif, penuh inisiatif dan inovatif dari masyarakat itu sendiri. Dalam paradigma komunikasi partisipatif-horisontal ini, semua massa-rakyat diundang untuk lebih berpartisipasi dalam proses komunikasi sampai dengan pengambilan keputusan. Komunikasi pendukung pembangunan dilaksanakan dalam model komunikasi horisontal, interaksi komunikasi dilakukan secara lebih demokratis. Karena itu kegiatan komunikasi bukan kegiatan memberi dan menerima melainkan “berbagi” atau “berdialog”. Isi komunikasi bukan lagi “pesan” yang dirancang oleh sumber dari atas, melainkan fakta, kejadian, masalah, kebutuhan yang dikodifikasikan menjadi “tema”. Semua suara didengar dan diperhatikan untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Maka yang terlibat dalam model komunikasi ini bukan lagi “sumber dan penerima” melainkan partisipan” yang satu dengan yang lain¹².

Selo Soemardjan¹³ menyatakan bahwa perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat.

Masyarakat Indonesia, kalau bisa dikatakan demikian, tidak terlepas dari fenomena pembangunan ini. Keanekaragaman, etnik, ras, kelompok, dan agama dengan bentuk dan tingkat kehidupan yang berbeda dalam masyarakat ini secara langsung maupun tidak langsung mendorong timbulnya perubahan dalam masyarakat sendiri atau menurut orientasinya ke luar masyarakat. Kurangnya komunikasi yang terjadi antara para penentu kebijakan dengan rakyat kebanyakan, menyebabkan model atau bentuk pembangunan yang diterapkan lebih memperlihatkan suatu model *‘top-down planning’* yang menurut satu kondisi dianggap lebih baik, namun dari sisi yang lain memberikan dampak yang kurang diharapkan; sejauh perkembangan masyarakat yang ada, ternyata sisi ke dua inilah yang dirasakan lebih memperlihatkan substansinya dalam masyarakat Indonesia ini.

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati

¹² Fred Wibowo, *Komunikasi Media Teater Rakyat, Paper Workshop Komunikasi Teater Rakyat*, Studio Audio Visual-Universitas Sanata Darma, Yogyakarta, Hal 2-3.

¹³ Selo Soemardjan dan Soemardi Soelaiman, 1974, *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

tata masyarakat yang dicita-citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (*continuity*) dan perubahan (*change*), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat.

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGI

Pengamatan lingkungan strategis yang tepat sangat diperlukan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan di masa depan sehingga kebijaksanaan dan strategi yang dilakukan dapat menghasilkan sesuatu yang efektif dan menguntungkan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Pengamatan yang dilakukan meliputi lingkungan global, regional dan nasional dari sudut astragatra.

a) Perkembangan Lingkungan Global

Deklarasi Johannesburg mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang disepakati oleh para kepala negara atau kepala pemerintahan dari 165 negara yang hadir pada KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan, September 2002. Hasil deklarasi tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen "Rencana Pelaksanaan KTT Pembangunan Berkelanjutan", yang juga telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia dengan target memberantas kemiskinan pada tahun 2015. Dalam deklarasi tersebut negara peserta menerapkan Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs). Dalam MDGs tersebut, terdapat 8 (delapan) tujuan (goal) yang hendak dicapai sampai tahun 2015 oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia, dengan tujuan pertama adalah mengatasi dan/atau memberantas kemiskinan dan kelaparan.¹⁴

b) Perkembangan Lingkungan Regional

Pada hakekatnya, pembentukan Komunitas ASEAN merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan kerjasama antar negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN, namun kini kerjasama regional tersebut pun sudah mulai dikembangkan dengan memperluas sasaran kerjasama dengan negara lain di luar negara Asia Tenggara yang dimaksudkan untuk memaksimalkan proses kerjasama ASEAN melalui transformasi pada bidang kerjasama yang

¹⁴ United Nations, 2000, [Http/www.google.com](http://www.google.com), diakses tanggal 10 Agustus 2012, Pukul 21.00 Wib.

dilakukan guna meningkatkan kemampuan negara-negara ASEAN dalam menghadapi perhelatan globalisasi.

c) Perkembangan Lingkungan Nasional

Perkembangan lingkungan nasional dapat dilihat dari aspek astra gatra, yaitu :

- a) Posisi dan lokasi geografi, b) Keadaan dan kekayaan alam, c) Keadaan dan kemampuan penduduk, d) idiologi, e) Politik, d) Ekonomi, e) Sosial Budaya, f) Pertahanan dan Keamanan.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SAAT INI DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Setiap masalah yang ada dalam pembangunan nasional mengakibatkan kondisi tertentu dalam ketahanan nasional. Dengan ketahanan nasional yang terus meningkat di segala aspek kehidupan bangsa, bangsa Indonesia akan tetap “*survive*”, betapa pun besarnya badai kehidupan yang datang menghantamnya di era kesejagatan ini. Badai tersebut pasti akan dapat di atasi dan pasti berlalu. Untuk dapat mengoperasionalkan pendekatan ketahanan nasional perlu mengetahui pendekatan kesisteman, karena ketahanan nasional merupakan suatu sistem. Kriteria suatu sistem dipenuhi oleh ketahanan nasional, yakni adanya komponen-komponen yang saling berinteraksi satu sama lain (astagrata) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yakni peningkatan kesejahteraan dan keamanan.

Aspek Asta Gatra, yaitu : merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh berupa hubungan timbal balik yang erat dan saling ketergantungan antara Tri Gatra dan Panca Gatra, pendekatan yang dilakukan adalah untuk memadukan dan mengintegrasikan beberapa aspek gatra diatas dalam rangka percepatan pembangunan di daerah tertinggal dengan tujuan untuk mempercepat tercapainya tujuan nasional.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sebagai suatu pendekatan partisipatif, fokusnya tidak hanya pada bukan hanya sebagai penerima tetapi ikut serta dalam proses pembangunan, baik dalam

perencanaan, pembangunan dan pengawasan, guna mengoptimalkan percepatan pembangunan nasional.

Pemberdayaan Masyarakat saat ini dapat dilihat dari sudut pandang asta gatra : (Gatra geografi, Gatra Demografi, Gatra Kekayaan Alam, Gatra Idiologi, Gatra Politik, Gatra Ekonomi, Gatra Sosial Budaya, Gatra Hankam)

Paradigma pembangunan yang berciri vertical *top-down* ini memunculkan beberapa masalah serius. Dalam konteks Indonesia, pembangunan yang diterapkan sesuai dengan model itu menimbulkan beberapa permasalahan di bidang politik, ekonomi dan budaya, baik di tingkat negara maupun masyarakat/*grass-root level*. Di tingkat negara, terjadi ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap negara-negara donor. Bahkan ketergantungan tidak terbatas dalam hal modal saja, melainkan juga kebijakan ekonomi. Alhasil, kebijakan ekonomi Indonesia tidak pernah mandiri. Proyek-proyek yang diadakan dengan bantuan modal, teknologi dan tenaga ahli asing tidak pernah berjalan efektif-efisien seiring kepentingan bangsa, melainkan lebih tertuju untuk memenuhi kepentingan negara-negara donor. Sementara itu, Indonesia semakin terdesak untuk ikut ambil bagian dalam pasar bebas yang dipelopori oleh negara-negara maju, tetapi sebenarnya tidak mempunyai kekuatan untuk menentukan mekanisme pasar sebagaimana yang bisa dilakukan oleh negara maju sebagai bentuk intervensi negara terhadap mekanisme pasar yang katanya bebas.

Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan nasional saat ini, yang menjadi permasalahan yang dihadapi saat ini :

1. Masih rendahnya sumber daya manusia.
2. Masih terbatasnya regulasi khususnya di daerah-daerah yang memberikan peluang terhadap pelibatan peran serta masyarakat.
3. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.
4. Belum optimalnya pemerataan pembangunan yang berkeadilan dengan konsep pemberdayaan masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

IMPLIKASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENINGKATAN KOMUNIKASI POLITIK DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL.

a. *Implikasi pemberdayaan Masyarakat terhadap komunikasi politik.*

Adapun implikasi yang diharapkan guna peningkatan komunikasi politik adalah:

- a) Menumbuhkan kesadaran diri untuk mendukung tatanan politik demokrasi pancasila, maka budaya politik yang menjunjung tinggi semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab perlu terus dikembangkan, didukung oleh moral dan etik politik yang bersumber pada nilai-nilai pancasila serta sikap kenegarawanan di dalam perilaku politik.
- b) Pembangunan nasional berbasis pemberdayaan masyarakat di harapkan dapat meningkatkan komunikasi politik bangsa Indonesia, hal ini mengingat masih lemahnya peran serta masyarakat dalam pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.
- c) Pembangunan nasional harus selalu memperhatikan pendidikan politik dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menuju masyarakat madani seperti yang di cita-cita oleh pendiri bangsa Indonesia (soekarno), sehingga masyarakat tidak lagi dijadikan sekedar objek pembangunan akan tetapi subjek yang turut diberdayakan dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

b. *Implikasi Pemberdayaan Masyarakat terhadap pembangunan Nasional.*

- a) Wawasan nusantara sebagai doktrin, nilai dan pedoman dalam implementasi sistem pemerintahan hendaknya selalu diaktualisasikan dalam pembangunan nasional sesuai dengan dinamika dan paradigma dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan karakteristik bangsa Indonesia yang bersifat majemuk dengan mengakui kebhineka tunggal ikaan bangsa Indonesia tidak bersifat seragam (*uniform*) tetapi mengedepankan kesatuan (*unity*), untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan keamanan yang pada gilirannya memperkuat ketahanan daerah, regional dan nasional dalam ikatan negara kesatuan republik Indonesia.
- b) Pemerintah dalam setiap agendanya terutama dalam pembangunan nasional agar tetap mendapat dukungan dan legitimasi masyarakat, maka di tuntut untuk membuka komunikasi politik yang intensif, menyaring aspirasi dan tuntutan masyarakat serta memberikan pelayanan yang terbaik.

PELUANG DAN KENDALA

a. Peluang

1. Walaupun begitu derasnya pengaruh globalisasi dan informasi melanda dunia terutama Indonesia dengan muatan dari negara maju berupa liberalisme, demokratisasi ala barat, faham komunisme, sosialisme namun bangsa Indonesia tetap teguh dan bersepakat bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah falsafah dan dasar negara yang harus dipertahankan serta diimplementasikan dengan norma kedaulatan rakyat.
2. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia merupakan amanat konstitusi (UUD 1945), yang menegaskan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jalan satu-satunya untuk mencapai tujuan di atas adalah melalui kegiatan pembangunan nasional. Pembangunan tersebut meliputi semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, dan sosial budaya serta pertahanan-keamanan.
3. Pengalaman pahit bangsa Indonesia terpuruk pada krisis yang berkepanjangan mendorong para pelaku ekonomi tidak ingin terpuruk lebih dalam. Tekad dan semangat serta keinginan seluruh masyarakat bangsa keluar dari krisis memberikan suasana baru saling kontrol, saling menjaga untuk tidak melakukan langkah yang keliru dalam pembangunan nasional.
4. Dibukanya koridor politik, ekonomi hukum sebagai bagian dari reformasi dan telah menjadi kesepakatan serta niat yang harus dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia memberikan angin segar harapan masyarakat dalam berperan serta membangun bangsa yang lebih demokratis.
5. Kuatnya komitmen kebangsaan yang diwujudkan dalam bentuk persatuan dan kesatuan bangsa dengan perekat satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa menjadi perekat kuat identitas bangsa Indonesia untuk tetap menjaga dan dilestarikan dibawah lambang "*bhineka tunggal ika*"

b. Kendala

1. Derasnya arus globalisasi dan informasi dengan membawa muatan dari negara sponsor membawa nilai-nilai baru yang mungkin bertentangan bahkan menginfiltasi nilai-nilai yang ada dimasyarakat yang tidak sejalan dengan falsafah pancasila. Maksudnya nilai-nilai baru bahkan cenderung menimbulkan konflik dengan nilai-nilai yang sudah ada.
2. Ekses reformasi politik yang begitu cepat bergulir ditangkap oleh sebagian masyarakat sebagai perwujudan demokrasi memunculkan persaingan partai politik yang ditandai dengan menjamurnya partai baru dengan aspirasi yang berbeda pula. Gelombang ini akan membawa dampak tarik menarik antara kepentingan nasional dengan kepentingan golongan, kelompok dan individu.
3. Ketidakseimbangan dalam kemampuan dan kesempatan untuk memanfaatkan peluang yang terbuka dalam proses pembangunan. Dengan proses pembangunan yang terus berlanjut, justru ketidakseimbangan itu dapat makin membesar yang mengakibatkan makin melebarnya jurang kesenjangan.
4. Masih berkembangnya budaya praktek KKN dalam sistem kehidupan masyarakat walaupun intensitasnya menurun membawa dampak kebocoran keuangan negara.
5. Belum pulihnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai akibat trauma lama menjadi apathis dalam berperan serta.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DIHARAPKAN GUNA MENINGKATKAN KOMUNIKASI POLITIK DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat *Community development* sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya, tanpa peran yang optimal dari pemerintah, pembangunan akan

berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah, yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru.

1. Konsepsi Pemberdayaan Masyarakat Yang Diharapkan

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut ; *pertama*, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. *Kedua*, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. *Ketiga*, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Implementasi program pembangunan yang menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat tersebut merupakan suatu konskuensi dari pergeseran paradigma pembangunan nasional yang mengarah pada tercapainya upaya pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*). Guna mengimplementasikan program pembangunan yang menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat maka ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yakni :

- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia,
- b. Peningkatan regulasi khususnya di daerah-daerah guna memberikan peluang terhadap pelibatan peran serta masyarakat,
- c. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia,

- d. Mengoptimalkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dengan konsep pemberdayaan masyarakat.

2. Kontribusi Pemberdayaan Masyarakat Guna Meningkatkan Komunikasi Politik Dalam Rangka Pembangunan Nasional

a. Kontribusi guna meningkatkan komunikasi politik

Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan diri dan kelompoknya, serta mampu mengeksistensikan diri secara jelas dengan mendapat manfaat darinya. Sehingga dengan konsep pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menjadi jembatan meningkatnya komunikasi politik dalam pembangunan nasional antara masyarakat dengan pemerintah dalam setiap agenda pembangunan baik dalam skala nasional maupun lokal, karena hasil dari pembangunan itu masyarakat sendiri yang akan merasakannya.

b. Kontribusi Guna Meningkatkan Komunikasi Politik dalam Rangka Pembangunan Nasional.

Strategi pembangunan Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan pemberdayaan masyarakat (*people empowering*) terutama dipedesaan. Pembangunan desa bersifat multisektoral dalam arti *Pertama* sebagai metode pembangunan masyarakat sebagai subyek pembangunan; *kedua* sebagai program dan *ketiga* sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa hal seluruh warga masyarakat tidak mungkin dilibatkan dalam membuat kebijakan, tetapi bagaimanapun dalam membuat kebijakan yang sifatnya untuk kepentingan publik sudah seharusnya pemerintah melibatkan warga masyarakat. Pemberdayaan partisipasi masyarakat sipil atau '*civil society*' merupakan alat ampuh dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan pada masa-masa mendatang, keterlibatan ini akan memberikan dampak yang positif terhadap

keputusan dan kebijakan yang diambil atau yang akan di implementasikan, karena dapat membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

KONSEPSI PEMECAHAN MASALAH

Dalam rangka memberdayakan masyarakat dalam memikul tanggung jawab pembangunan, peran pemerintah dapat ditingkatkan antara lain melalui (a) pengurangan hambatan dan kendala-kendala bagi kreativitas dan partisipasi masyarakat, (b) perluasan akses pelayanan untuk menunjang berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan (c) pengembangan program untuk lebih meningkatkan kemampuan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat berperan aktif dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya produktif yang tersedia sehingga memiliki nilai tambah tinggi guna meningkatkan kesejahteraan mereka.¹⁵

Kebijakan dan Strategi:

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat dikemukakan kebijakan sebagai berikut **“Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Guna Meningkatkan Komunikasi Politik Dalam Rangka Pembangunan Nasional”**. Kebijakan tersebut selanjutnya menjadi arah dan pedoman dalam merumuskan berbagai strategi dan upaya. Mengacu pada kebijakan tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan strategi pokok, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia
2. Peningkatan regulasi khususnya di daerah-daerah guna memberikan peluang terhadap pelibatan peran serta masyarakat.
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia
4. Mengoptimalkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dengan konsep pemberdayaan masyarakat.

Strategi pokok yang telah ditetapkan dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Upaya I : Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Metode : Edukasi.

¹⁵ *Ibid.*

1. Pemerintah maupun pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak akademisi maupun LSM memberikan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap program pembangunan nasional;
2. Pemerintah bekerjasama dengan akademisi. LSM memberikan pendidikan politik yang bertujuan terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat yang diwujudkan melalui partisipasi politik dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi dari pembangunan itu sendiri;
3. Pemerintah bekerjasama dengan elemen terkait memberikan pendidikan dan pelatihan melalui strategi pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan pembangunan yang bertumpu pada kemampuan manusia (*capacity building*).

2. Upaya II : Peningkatan regulasi khususnya di daerah-daerah guna memberikan peluang terhadap pelibatan peran serta masyarakat.

Metode : Regulasi

1. Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong melalui regulasi yang tegas terhadap pengurangan hambatan dan kendala-kendala bagi kreativitas dan partisipasi masyarakat;
2. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM dan DPR mengeluarkan instrument hukum yang secara substantif mengatur pelibatan masyarakat dan elemen masyarakat mana yang dilibatkan dalam proses pembangunan nasional itu sendiri, sehingga mekanisme pelibatan masyarakat menjadi jelas;
3. Pemerintah maupun pemerintah daerah melalui regulasi yang tegas memfasilitas guna mendistribusikan hasil-hasil pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat.

3. Upaya III : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

Metode : Deseminasi dan Kebijakan.

1. Pemerintah bekerjasama dengan elemen terkait mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan pola pengembangan kemitraan.

2. Pemerintah mendorong pengembangan program untuk lebih meningkatkan kemampuan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat berperan aktif dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya produktif yang tersedia sehingga memiliki nilai tambah tinggi guna meningkatkan kesejahteraan mereka.
3. Pemerintah melalui kebijakan yang tegas mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat dengan kepastian modal dan kepastian pasar.
4. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tegas guna menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat serta meningkatkan akses masyarakat miskin pada pelayanan dasar.
5. Pemerintah melakukan pemerataan pembangunan yang berkeadilan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan.

4. Upaya IV : Mengoptimalkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta pemberdayaan masyarakat.

Metode : Kebijakan dan Regulasi.

1. Pemerintah bersama DPR mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang tegas guna meningkatkan reformasi kelembagaan dengan meningkatkan keterlibatan dan kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar pembangunan nasional menjadi efisien dan terkendali.
2. Pemerintah bersama DPR membuat regulasi yang tegas dalam rangka meningkatkan keserasian hubungan antar daerah dan antara Pusat dan Daerah, termasuk keserasian kebijakan dalam dan antar daerah, serta antara kebijakan nasional dan daerah terutama dalam pemerataan pembangunan.
3. Pemerintah membuat kebijakan yang tegas guna meningkatkan Pemberdayaan dan keterbukaan dalam setiap agenda pembangunan nasional, yang akan lebih mendorong akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya, dan adanya keputusan-keputusan pembangunan yang benar-benar diarahkan sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat,

serta dilakukan secara riil dan adil sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat.

4. Pemerintah bersama DPR membuat kebijakan dan regulasi guna mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dan Sumatera dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali dan Sumatera;

Kesimpulan

1. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional merupakan salah satu syarat mutlak dalam era kebebasan dan keterbukaan saat ini. Pengabaian terhadap faktor ini, terbukti telah menyebabkan terjadinya deviasi yang cukup signifikan terhadap tujuan pembangunan itu sendiri yaitu keseluruhan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemborosan keuangan negara merupakan implikasi lain deviasi tersebut. Proses pelibatan partisipasi masyarakat lokal dalam implementasi proyek-proyek pembangunan di tingkat kabupaten/kota, terbukti telah berhasil membawa perubahan-perubahan mendasar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan diri dan kelompoknya, serta mampu mengeksistensikan diri secara jelas dengan mendapat manfaat darinya. Sehingga dengan konsep pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menjadi jembatan meningkatnya komunikasi politik dalam pembangunan nasional antara masyarakat dengan pemerintah dalam setiap agenda pembangunan baik dalam skala nasional maupun lokal, karena hasil dari pembangunan itu masyarakat sendiri yang akan merasakannya.
3. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa hal seluruh warga masyarakat tidak mungkin dilibatkan dalam membuat kebijakan, tetapi bagaimanapun dalam membuat kebijakan yang sifatnya untuk kepentingan

publik sudah seharusnya pemerintah melibatkan warga masyarakat. Jika tidak, suatu gejolak sosial akan terjadi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Banyak contoh produk kebijakan yang sangat kontra di masyarakat sebagai akibat pemerintah senantiasa tidak membuka diri untuk melibatkan masyarakat dalam membuat kebijakan. Pemberdayaan partisipasi masyarakat sipil atau '*civil society*' merupakan alat ampuh dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan guna meningkatkan komunikasi politik dalam rangka pembangunan nasional pada masa-masa mendatang, keterlibatan ini akan memberikan dampak yang positif terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil atau yang akan di implementasikan, karena dapat membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Saran

1. Disarankan kepada pemerintah hendaknya dalam setiap agenda penyusunan rencana pembangunan nasional hendaknya memperhatikan partisipasi masyarakat hal ini dikarenakan Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri mereka.
2. Disarankan kepada pemerintah hendaknya menjadikan konsep pemberdayaan masyarakat menjadi jembatan/sarana guna meningkatnya komunikasi politik dalam pembangunan nasional antara masyarakat dengan pemerintah dalam setiap agenda pembangunan baik dalam skala nasional maupun lokal.
3. Pemberdayaan partisipasi masyarakat sipil atau '*civil society*' merupakan alat ampuh dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan guna meningkatkan komunikasi politik dalam rangka pembangunan nasional pada masa-masa mendatang sehingga diharapkan pemerintah mampu memberikan instrument hukum dan regulasi yang tegas terkait dengan pelibatan peran serta masyarakat dalam agenda pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Astrid S. Susanto, *Komunikasi Sosial di Indonesia*, Jakarta, 1989.
- Arif Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1995.
- Agnes Sunartiningsih, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Aditya Media, Yogyakarta, 2004.
- E. Suharto, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*. Community work in New Zealand, 2002.
- Fred Wibowo, *Komunikasi Media Teater Rakyat*, Paper Workshop Komunikasi Teater Rakyat, Studio Audio Visual-Universitas Sanata Darma, Yogyakarta.
- Frances Cleaver, dalam Bill Cooke dan Uma Kothari, *Participation: the New Tyranny*. Zed Books, London. 2002.
- Jhon Clark, "The State, Popular Participation, and the Voluntary Sector." World Development. 1995.
- Jhon Friedman, *Empowerment The Politics of Alternative Development*. Blackwell Publishers, Cambridge, USA, 1992.
- Joseph Stiglitz, *Globalization and its discontents*, Penguin Books, England, 2002.
- INFID, *Pembangunan di Indonesia: memandang dari sisi lain*, Yayasan Obor, Jakarta. 1993.
- L. Soetrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Laode M. Kalamuddin, *Format Indonesia Baru Paradigma Pembangunan Menuju Millenium III*, Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- M. Tampobulon, *Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah*. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Medan. Sumatera Utara. 2006.
- Manfred Oepen, (ed) *Media Rakyat, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M)*, Media Rakyat, Jakarta, 1988.

- Mustopadidjaja AR, *"Format Bernegara Menuju Masyarakat Madani"*; dalam *Administrasi Negara, Demokrasi dan Masyarakat Madani*, LAN, 1999.
- Onny S.Priyono dan A.M.W. Pranarka, *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta, 1996.
- Pokja Lemhannas RI. 2007. *BS Geostrategi dan Tannas: Modul 3 Konsepsi dan Tolok Ukur Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lemhannas RI.
- R.Chambers, *Rural Development : Putting The Last First*, London; New York: Longman, 1995
- Riswandha Imawan, *Menciptakan Birokrasi yang Responsif untuk Pembangunan Martabat Manusia*, Gadjah Mada Press Yogyakarta, 1990.
- S. Kumar, *Methods for Community Participation*, ITDP Publishing, London. 2002.
- Sardjono MA, *Mosaik Sosiologi Kehutanan: masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumberdaya*. Jogyakarta: Debut press. 2004.
- Selo Soemardjan dan Soemardi Soelaiman, *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1974.
- Tri Winarni, *Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21, Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*, Fisipol UGM, Aditya Media, Yogyakarta, 1998.
- Trevor Parfitt, *'The Ambiguity of Participation: a Qualified Defence of Participatory Development'*, Third World Quarterly, 2004.
- Tony Bovaird & Elke Löffler, *"Public Management and Governance"*. 2004.
- Windhu, I. Marsana, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Kanisius, Yogyakarta, 1992.
- Zulkarimein Nasution, *Komunikasi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 1988.

B. Artikel/Makalah/Distertasi/Tesis/Skripsi

- A. Mahmudi, *Metode Penelitian Kritis dan Prinsip-prinsip Participatory Action Research (PAR)*. Jurnal Inovasi Pendidikan Tinggi Agama Islam Swara Ditperta: No. 19 Th. II, 15 November 2004.
- Budi Suwarna dan M. Yunus, *Bankir Kaum Papa*, Artikel Kompas tanggal 14 Oktober 2006.

Mahmuddin Muslim, 2006, *Menanti APBD berbasis Partisipasi Masyarakat, Makalah Disampaikan pada Training APBD*, Bukittinggi, Departemen Keuangan RI.

Saharia, *Pemberdayaan Masyarakat Di Pedesaan Sebagai Salah Satu Upaya Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Manusia Secara Optimal*. Makalah Individu Pengantar Falsafah Sains (PPS702). Sekolah Pascasarjana / S3 Institut Pertanian Bogor, 2003.